

Studi Kasus Eksploratif Tentang Tata Kelola Kolaboratif Berbasis Komunitas Di Destinasi Ekowisata Mangrove Banua Pangka, Luwu Timur

Hamris Darwis^{1,a}, Khadijah Thahir Muda^{2,a}, Rosmawati^{3,a}, Yusriana^{4,a}, Rafika Hayati^{5,a}, Zulkifli Mappasomba^{6,a}
 hamrisdarwis@unhas.ac.id¹, khadijah@unhas.ac.id², rosmawati@unhas.ac.id³, yusriana@unhas.ac.id⁴,
rafikahayati@unhas.ac.id⁵, zulkifli_mps@unismuh.ac.id⁶

^a Indonesia Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Pariwisata, Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Indonesia

Abstract

Strengthening community-based tourism (CBT) governance is an important strategy in the development of sustainable destinations, especially in ecologically vulnerable coastal areas. However, field practices often show a shift in power when formal actors take over management from pioneering communities, as seen in the Banua Pangka mangrove ecotourism destination, East Luwu. There is still limited understanding of how community exclusion occurs in the context of that institutional transition and how the community responds to it. This study shows that the dominance of formal institutions can lead to symbolic and procedural marginalization of the initiating community, but it also gives rise to adaptive strategies from the community to maintain its existence. This research uses an exploratory case study approach with a focus on a single coastal destination. Data were collected through semi-structured interviews, field observations, and local document analysis. The analysis was conducted thematically using NVivo software. The results show that there is a tension between the idealism of CBT and the reality of bureaucratization, which impacts participatory exclusion and decision-making disparities. On the other hand, the community was able to establish alternative business groups as a form of resistance and adaptive innovation. This study contributes to the development of more inclusive and adaptive tourism governance designs, and provides contextual lessons for policymakers and tourism industry actors in other coastal areas, particularly those characterized by marine ecotourism.

Keyword: Community-Based Tourism; community exclusion; collaborative governance; Banua Pangka; marine ecotourism

I. PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir, pariwisata berbasis komunitas (CBT) telah muncul sebagai pendekatan yang diakui luas dalam mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan. CBT tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memberdayakan komunitas lokal secara ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme pelestarian lingkungan dan budaya, serta penguatan modal sosial di tingkat lokal (Goodwin, 2009). Dalam pendekatan ini, komunitas lokal diakui sebagai pemilik, perencana, pengelola, dan penerima manfaat utama dari aktivitas pariwisata di wilayah mereka (Giampiccoli & Saayman, 2014). Prinsip inti CBT terletak pada jaminan bahwa inisiatif pariwisata berakar kuat pada nilai, kebutuhan, dan aspirasi komunitas itu sendiri (Zapata et al., 2011).

Hal ini menuntut pergeseran dari pendekatan top-down tradisional menuju model partisipatif di mana anggota komunitas terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pembangunan berkelanjutan wilayah mereka. Dengan memberdayakan komunitas untuk memimpin inisiatif pariwisata, CBT bertujuan menciptakan industri pariwisata yang lebih adil dan berkelanjutan, yang

menguntungkan masyarakat lokal sekaligus melindungi lingkungan. Namun, implementasi CBT seringkali menghadapi tantangan signifikan, terutama ketika pihak eksternal atau institusi formal terlibat dengan agenda kelembagaan mereka sendiri (Mitchell & Muckosy, 2008).

Dominasi institusi formal dalam konteks CBT dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan antara komunitas lokal dan aktor institusional (Scheyvens, 2002). Ketidakseimbangan ini sering kali menyebabkan komunitas kehilangan kendali atas destinasi yang mereka rintis karena lemahnya dukungan regulasi atau posisi tawar mereka dalam struktur kelembagaan pariwisata (Manyara & Jones, 2007). Dalam banyak kasus, komunitas menjadi terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan, dengan suara dan kepentingan mereka diabaikan demi kepentingan institusional (Reed, 2008). Ini dapat mewujud sebagai eksklusi simbolik atau prosedural, di mana komunitas dikeluarkan dari lembaga formal atau kontribusinya direduksi menjadi sekadar pelengkap dibandingkan otoritas ahli atau mandat institusional (Hall, 2011). Eksklusi semacam ini tidak hanya mengikis prinsip CBT tetapi juga merusak modal sosial dan kepercayaan yang esensial untuk keberhasilan inisiatif berbasis komunitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian

kritis terhadap peran aktor kelembagaan dalam CBT dan dikembangkan strategi untuk menjamin partisipasi yang adil serta pembagian manfaat yang setara bagi komunitas lokal (Bramwell & Lane, 2011). Di wilayah pesisir dan dalam konteks ekowisata, pendekatan CBT sangat relevan karena erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang rentan dan ekosistem lokal yang unik seperti mangrove, terumbu karang, dan kawasan budidaya perairan (Orams, 1995). Pengelolaan partisipatif tidak hanya memastikan keberlanjutan lingkungan tetapi juga melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya komunitas yang hidup selaras dengan alam (Asker et al., 2010). Komunitas pesisir umumnya memiliki pengetahuan dan praktik tradisional yang penting bagi pengelolaan sumber daya mereka secara berkelanjutan (Isaacs, 2000). Dengan mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata, CBT dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati, melestarikan ekosistem, dan mempromosikan warisan budaya. Oleh karena itu, perluasan diskursus akademik mengenai tata kelola destinasi berbasis komunitas menjadi penting, dengan menekankan keseimbangan partisipasi komunitas dan keterlibatan institusional secara inklusif dan adil (Simpson, 2008).

Penelitian ini membangun argumen tersebut dengan mengkaji kasus Banua Pangka di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Syahrul, 2021). Destinasi ini awalnya muncul sebagai lokasi ekowisata pesisir melalui inisiatif komunitas pemuda lokal yang memanfaatkan limbah kayu untuk membangun infrastruktur awal (Rahman et al., 2022). Inisiatif ini kemudian menarik perhatian publik luas dan berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang secara formal dikelola oleh pemerintah desa dan BUMDes (Perdana & Hasan, 2023). Transformasi ini menciptakan dinamika baru dalam tata kelola destinasi, khususnya terkait peran dan posisi komunitas perintis dalam sistem kelembagaan yang telah terbentuk (Arsyad et al., 2023).

Peralihan dari pengelolaan berbasis komunitas menuju sistem formal menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana visi dan nilai-nilai awal komunitas tetap terjaga serta potensi konflik kepentingan antara komunitas dan struktur manajemen formal. Pemahaman terhadap dinamika ini penting untuk memastikan manfaat pariwisata terdistribusi secara adil dan keberlanjutan destinasi tetap terjaga (Coria & Calfucura, 2012).

Banyak studi menyoroti keberhasilan CBT dalam memberdayakan komunitas (Timothy, 2007), namun sedikit yang mengkaji dinamika

konflik antaraktor ketika kekuasaan berpindah dari komunitas ke institusi formal (Blackstock, 2005). Literatur CBT yang ada umumnya fokus pada pemberdayaan, manfaat ekonomi, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, tetapi kurang mendalam dalam dinamika kekuasaan yang muncul ketika institusi formal mulai terlibat (Jones, 2005). Studi-studi tersebut cenderung menekankan aspek positif dari keterlibatan institusi seperti efisiensi dan promosi, sementara dampak negatif terhadap partisipasi dan kontrol komunitas sering diabaikan (Hall & Jenkins, 1995). Oleh karena itu, perlu ada penelitian yang secara kritis menelaah hubungan kekuasaan antara komunitas dan institusi dalam konteks CBT, serta strategi yang dapat digunakan komunitas untuk mempertahankan otonominya (Tosun, 2000).

Literatur CBT juga kurang membahas bentuk perlawanan sosial dan strategi adaptif komunitas ketika mengalami eksklusi struktural (Scheyvens & Biddulph, 2018). Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana komunitas yang termarginalisasi beradaptasi dan mempertahankan agensinya di tengah perubahan tata kelola (Bianchi, 2009).

Dalam kerangka ini, penting untuk menelaah bagaimana perubahan struktur tata kelola memengaruhi partisipasi komunitas lokal, dan sejauh mana prinsip CBT masih dipertahankan dalam praktik manajemen baru (Beeton, 2006). Studi ini juga ingin memahami bentuk eksklusi yang dialami komunitas serta bagaimana respons adaptif mereka terhadap perubahan tersebut.

Melalui studi kasus Banua Pangka, ditemukan bahwa ketika institusi formal mengambil alih pengelolaan destinasi, terjadi ketegangan antara prinsip CBT dan realitas birokratisasi (Novelli & Gebhardt, 2007). Eksklusi simbolik dan prosedural tidak hanya menghambat partisipasi komunitas, tetapi juga memicu pembentukan strategi adaptif sebagai bentuk ketahanan sosial dan ekonomi. Komunitas merespons dengan mengembangkan aktivitas ekonomi alternatif seperti usaha mikro atau jasa wisata informal serta aksi sosial-politik untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka. Studi ini menunjukkan bahwa komunitas memiliki kapasitas untuk merespons tekanan kelembagaan melalui inovasi dan ketahanan sosial (Jamal & Getz, 1995). Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual dan empiris bagi pengembangan model tata kelola destinasi yang lebih adil, inklusif, dan tahan terhadap tekanan eksternal, serta menempatkan partisipasi komunitas sebagai inti dari keberlanjutan pariwisata (Dredge & Jenkins, 2007).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus eksploratif untuk menggambarkan dan menganalisis dinamika tata kelola pariwisata berbasis komunitas di Banua Pangka. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks, aktor, proses, dan relasi kuasa dalam perubahan kelembagaan destinasi (Yin, 2018). Studi kasus dianggap sesuai karena mampu menangkap kompleksitas dinamika sosial secara kontekstual (Creswell & Poth, 2018).

Desain studi kasus eksploratif digunakan untuk memahami proses eksklusi komunitas lokal serta strategi adaptasi dalam menghadapi restrukturisasi kelembagaan. Studi ini menekankan pada pendekatan induktif-kualitatif dengan tujuan membangun pemahaman kontekstual berbasis narasi lapangan, bukan menguji hipotesis (Stake, 1995; Merriam, 2009).

Penelitian dilaksanakan di Banua Pangka, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Unit analisis utama adalah sistem tata kelola destinasi, dengan fokus pada hubungan antara komunitas penggagas, pemerintah desa, BUMDes, serta pelaku usaha dan wisatawan. Fokus pada wilayah pesisir dan ekosistem mangrove menjadikan studi ini relevan dengan pendekatan ekowisata bahari (Weaver, 2008; Orams, 1995).

Informan dipilih secara purposif (purposive sampling) karena keterlibatan langsung mereka dalam pembangunan dan transformasi destinasi (Patton, 2002). Total 18 informan terdiri atas:

- a. 5 penggagas komunitas pemuda,
- b. 3 aparat desa/BUMDes,
- c. 5 pelaku usaha wisata,
- d. 5 wisatawan aktif.

Snowball sampling digunakan untuk menjangkau aktor tambahan seperti tokoh informal dan admin media sosial (Noy, 2008).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif. Panduan wawancara disusun mengacu pada isu-isu utama dalam tata kelola komunitas, eksklusi, dan partisipasi (Scheyvens, 1999; Blackstock, 2005). Observasi difokuskan pada interaksi antaraktor dan simbol ruang yang menunjukkan dinamika kuasa (Lefebvre, 1991)..

Selain itu, dokumen sekunder seperti peraturan desa, arsip media sosial (termasuk unggahan komunitas dan BUMDes), notulen musyawarah, dan laporan keuangan BUMDes turut dianalisis sebagai bagian dari triangulasi sumber untuk memperkuat validitas temuan. (Bowen, 2009).

Analisis tematik dilakukan berdasarkan prosedur Braun dan Clarke (2006), yang melibatkan enam tahap analisis kualitatif. NVivo

14 digunakan untuk membantu proses coding, visualisasi tema, dan mengelola kompleksitas hubungan antar kategori data (Bazeley & Jackson, 2013).

Data dianalisis secara tematik dengan mengikuti prosedur Braun dan Clarke (2006), yang meliputi: transkripsi data wawancara, coding awal (membuat kode deskriptif), pencarian tema (mengelompokkan kode-kode yang relevan), peninjauan ulang tema (memastikan konsistensi dan relevansi tema), definisi tema (memberikan nama dan deskripsi jelas untuk setiap tema), dan penyusunan laporan analisis. Perangkat lunak NVivo 14 digunakan untuk membantu proses coding, pemetaan hubungan antarkode, dan visualisasi visualisasi tema, dan mengelola kompleksitas hubungan antar kategori data (Bazeley & Jackson, 2013).

Validasi dilakukan dengan strategi triangulasi sumber, member checking, dan audit trail. Strategi ini penting dalam meningkatkan kredibilitas dan keterujian hasil penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985; Nowell et al., 2017). Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, digunakan beberapa strategi berikut:

- a) Triangulasi sumber: membandingkan informasi dari wawancara dengan informan yang berbeda, hasil observasi, dan analisis dokumen untuk memastikan konsistensi temuan.
- b) Member checking: konfirmasi hasil interpretasi kepada lima informan kunci untuk memastikan bahwa pemahaman peneliti sesuai dengan perspektif mereka.
- c) Audit trail: dokumentasi menyeluruh dari proses analisis yang dapat ditelusuri kembali dari data mentah hingga kesimpulan, sehingga meningkatkan transparansi dan keterujian penelitian.

Etika penelitian dijaga melalui informed consent tertulis, jaminan anonimitas, dan hak partisipan untuk menarik diri kapan saja. Persetujuan etik diperoleh dari Komite Etik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, sesuai prinsip etika penelitian sosial (Israel & Hay, 2006).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil temuan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Empat tema utama berhasil diidentifikasi yang menggambarkan dinamika perubahan tata kelola, posisi komunitas dalam pengelolaan destinasi, serta strategi adaptasi yang mereka lakukan. Tiap tema didukung oleh kutipan langsung informan dan data kontekstual.

Tema 1: Inisiatif Komunitas sebagai Motor Awal Destinasi

Banua Pangka berawal dari inisiatif kelompok pemuda lokal yang prihatin terhadap kondisi ekosistem mangrove di wilayah mereka dan potensi destinasi tersebut yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan keterbatasan sumber daya, mereka secara sukarela mengumpulkan limbah kayu bekas kapal dan merancang jalur setapak yang dapat digunakan wisatawan menyusuri area hutan mangrove. Inisiatif ini tidak hanya menarik perhatian warga sekitar, tetapi juga memantik antusiasme di media sosial, menjadikan lokasi ini cepat viral.

"Kami tidak punya dana waktu itu, hanya semangat dan sisa kayu dari galangan kapal. Tapi dari situlah kami mulai, dan banyak orang datang foto-foto. Jadi viral." (Informan 3, Penggagas komunitas)

Jalur setapak yang dibangun menjadi ikon utama destinasi, sekaligus ruang ekspresi kreatif generasi muda untuk menciptakan spot foto, gazebo sederhana, dan aktivitas edukasi lingkungan. Hal ini secara jelas menunjukkan kapasitas inovatif komunitas dalam menciptakan nilai wisata berbasis lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, selaras dengan prinsip-prinsip ekowisata bahari.

Tema 2: Intervensi Pemerintah dan BUMDes

Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan dan potensi ekonomi yang mulai terlihat, Pemerintah Desa Bawalipu dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengambil alih sebagian besar pengelolaan kawasan. Langkah ini disertai dengan revitalisasi infrastruktur, pemasangan fasilitas publik seperti toilet umum dan area parkir, serta penerapan sistem retribusi pengunjung yang lebih formal.

"Setelah ada surat dari kabupaten tentang pengelolaan wisata, desa mengambil alih. Tapi kami tidak diajak diskusi, tiba-tiba saja BUMDes masuk." (Informan 1, Penggagas komunitas)

Meskipun langkah ini dimaksudkan untuk memperbaiki manajemen destinasi dan meningkatkan pendapatan desa, sebagian besar komunitas penggagas merasa terpinggirkan karena tidak dilibatkan secara memadai dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Struktur kelembagaan yang baru lebih bersifat top-down dan administratif, bergeser dari model partisipatif yang diinisiasi komunitas.

Tema 3: Konflik Peran dan Ketimpangan Akses

Masuknya pemerintah desa dan BUMDes menciptakan perubahan struktur tata kelola yang

signifikan. Komunitas yang sebelumnya menjadi aktor utama dalam operasionalisasi destinasi, perlahan kehilangan akses terhadap sumber daya dan ruang pengambilan keputusan. Ketimpangan ini menciptakan ketegangan sosial dan rasa tidak adil di kalangan penggagas awal, yang merasa kontribusi historis mereka kurang dihargai.

"Dulu kami yang bersihkan area, yang bangun jalan. Sekarang malah tidak tahu ada rapat atau rencana apa." (Informan 5, Komunitas pemuda)

Keputusan penting terkait penggunaan dana retribusi, strategi promosi destinasi, dan pengembangan fasilitas wisata tidak lagi melibatkan komunitas penggagas. Ketimpangan ini berdampak negatif pada motivasi dan keberlanjutan partisipasi komunitas, mengikis semangat kolaborasi sejati yang menjadi inti CBT.

Tema 4: Strategi Adaptasi Komunitas

Merespons kondisi tersebut, komunitas penggagas tidak sepenuhnya mundur dari kancan pengelolaan pariwisata. Mereka berinisiatif membentuk kelompok usaha wisata mandiri yang menawarkan jasa seperti pemandu lokal, penyewaan alat foto, dan makanan khas lokal. Bentuk adaptasi ini menjadi strategi bertahan terhadap eksklusi struktural yang mereka alami.

"Kalau kita tidak bisa masuk sistem, kita tetap berkarya lewat cara lain. Kami buka usaha sendiri, tetap layani wisatawan dengan cara kami." (Informan 2, Koordinator komunitas)

Inisiatif ini membuktikan bahwa komunitas memiliki kapasitas untuk berinovasi dan menegosiasikan ruang eksistensi di tengah dominasi kelembagaan formal. Usaha ini juga menjadi simbol perlawanan sosial terhadap penghapusan kontribusi historis komunitas dalam pembangunan destinasi dan upaya mereka untuk tetap menjadi bagian integral dari ekowisata bahari Banua Pangka.

Tema	Sub Tema	Kutipan Utama	Sumber Data
Inisiatif Komunitas	Penggunaan limbah kayu, Viralitas destinasi	"...kami mulai, dan banyak orang datang foto-foto...."	Wawancara Observasi
Intervensi Pemerintah	BUMDes mengambil alih pengelolaan	"...tiba-tiba saja BUMDes masuk..."	Wawancara Dokumen Desa
Konflik Peran	Komunitas tidak diikutsertakan dalam rapat	"...tidak tahu ada rapat atau rencana apa..."	Wawancara Observasi
Strategi	Pembentukan	"...kita	Wawancara

Adaptasi	Kelompok Usaha Baru	tetap berkarya lewat cara lain...."	Observasi lapangan
----------	---------------------	-------------------------------------	--------------------

Temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa eksklusi terhadap komunitas bukan hanya akibat kebijakan yang tidak adil, tetapi juga karena tidak adanya sistem tata kelola yang memungkinkan kolaborasi sejati antara aktor komunitas dan lembaga formal, terutama dalam konteks pengembangan ekowisata bahari.

Peran Inisiatif Komunitas dalam Pembangunan Destinasi

Temuan studi ini memperlihatkan bahwa komunitas lokal memiliki peran sentral dalam tahap inisiasi destinasi ekowisata berbasis mangrove di Banua Pangka. Inisiatif tersebut mencerminkan praktik Community-Based Tourism (CBT) yang lahir dari kebutuhan dan kepedulian lokal terhadap kelestarian lingkungan dan peluang ekonomi (Scheyvens, 1999). Dalam konteks ini, kelompok pemuda tidak hanya menjadi pelaku teknis pembangunan infrastruktur awal, tetapi juga aktor budaya yang membentuk identitas destinasi melalui narasi lokal, simbol visual, dan kreativitas media sosial.

Praktik seperti ini menunjukkan adanya bentuk "endogenous development" di mana komunitas menggunakan sumber daya internal untuk menciptakan solusi inovatif (Pretty, 1995). Keberhasilan awal ini memperkuat argumentasi bahwa ketika diberi ruang, komunitas lokal mampu menjadi agen utama dalam transformasi sosial dan ekologis destinasi wisata (Asker et al., 2010).

Intervensi Kelembagaan dan Pergeseran Struktur Kuasa

Masuknya BUMDes dan Pemerintah Desa ke dalam sistem pengelolaan menandai pergeseran dari tata kelola partisipatif menuju struktur formal yang lebih administratif. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa transformasi kelembagaan dalam destinasi berbasis komunitas sering kali mengarah pada proses "institutional capture" oleh aktor yang memiliki legitimasi formal, namun tidak selalu mengakomodasi pengetahuan lokal (Hall, 2011).

Fenomena ini tidak terlepas dari dinamika politik lokal, di mana institusi formal memanfaatkan kerangka legal (seperti surat keputusan desa) untuk memperkuat kontrol atas aset wisata. Perubahan ini menunjukkan pola eksklusi yang bersifat struktural, sebagaimana diidentifikasi dalam teori political ecology yang menyoroti konflik kepentingan antara komunitas lokal dan elit institusional dalam penguasaan sumber daya (Bryant & Bailey, 1997).

Studi ini berhasil menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses eksklusi komunitas

terjadi dalam transisi tata kelola destinasi. Proses eksklusi terjadi tidak dalam bentuk larangan eksplisit, tetapi melalui normalisasi prosedural dan simbolik yang secara halus mengurangi ruang partisipatif komunitas. Misalnya, hilangnya keterlibatan komunitas dalam forum musyawarah desa dan perencanaan BUMDes menggambarkan bentuk eksklusi prosedural. Di sisi lain, narasi resmi pemerintah desa yang tidak menyebutkan secara menonjol kontribusi komunitas dalam sejarah pengembangan destinasi menciptakan eksklusi simbolik. Dalam konteks ini, eksklusi bukan hanya soal siapa yang memutuskan, tetapi juga siapa yang diakui sebagai pemilik narasi dan sejarah pengembangan destinasi ekowisata mangrove.

Ketimpangan Peran dan Simbol Eksklusi

Konflik peran yang muncul akibat marginalisasi komunitas penggagas menimbulkan ketimpangan akses terhadap informasi, perencanaan, dan distribusi manfaat. Hal ini memperkuat kritik terhadap narasi "partisipasi semu" dalam tata kelola CBT, di mana partisipasi hanya bersifat prosedural, bukan substantif (Tosun, 2000). Dalam konteks Banua Pangka, komunitas tidak lagi memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah pengambilan keputusan, meskipun mereka memiliki legitimasi moral dan historis.

Visualisasi eksklusi seperti hilangnya nama komunitas dalam promosi resmi, tidak diundangnya perwakilan komunitas dalam rapat desa, serta pengambilalihan fasilitas yang dibangun secara swadaya mencerminkan terjadinya "disempowerment through formalization" (Goodwin & Santilli, 2009).

Strategi Adaptif dan Negosiasi Ruang Komunitas

Meskipun menghadapi tekanan struktural, komunitas penggagas menunjukkan kapasitas adaptif melalui strategi ekonomi alternatif, seperti jasa wisata lokal dan usaha kuliner. Strategi ini dapat dipahami sebagai bentuk "everyday resistance" (Scott, 1985), di mana komunitas menegosiasikan ruangnya dengan cara yang tidak konfrontatif tetapi tetap mempertahankan otonomi.

Adaptasi semacam ini menandakan bahwa kekuasaan dalam CBT tidak bersifat mutlak, melainkan dapat dinegosiasikan secara dinamis (Cole, 2006). Bentuk adaptasi komunitas juga memperlihatkan pentingnya mempertahankan ruang partisipatif non-formal yang memungkinkan ekspresi sosial dan budaya tetap hidup di tengah dominasi institusi formal.

Studi ini menyoroti pentingnya memahami CBT bukan semata sebagai model teknokratik pengelolaan wisata berbasis komunitas, tetapi sebagai arena politik yang sarat dengan negosiasi kuasa, relasi sosial, dan identitas lokal. Ketika tata kelola tidak lagi mengakui sejarah kontribusi

komunitas, maka risiko delegitimasi sosial dan hilangnya rasa kepemilikan akan semakin besar (Giampiccoli & Saayman, 2018).

Implikasi praktisnya adalah perlunya kerangka kebijakan yang tidak hanya mendukung kelembagaan formal seperti BUMDes, tetapi juga menjamin pengakuan hak moral komunitas dalam struktur tata kelola. Dengan demikian, prinsip inklusi dan kolaborasi dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan temuan Scheyvens dan Biddulph (2018) serta Snyman (2021) yang menyatakan bahwa dalam konteks pengelolaan destinasi berbasis komunitas, eksklusi sering kali dilegitimasi oleh formalitas kelembagaan yang bersifat top-down. Selain itu, Stone dan Nyaupane (2022) juga menyoroti bagaimana hambatan institusional dapat memengaruhi keberlanjutan CBT di area konservasi. Namun, kontribusi penting dari studi ini adalah penekanan pada strategi adaptif komunitas yang tidak banyak dibahas secara mendalam dalam literatur terdahulu. Komunitas di Banua Pangka tidak bersikap pasif; mereka membentuk inisiatif ekonomi baru dan memanfaatkan ruang-ruang sosial untuk tetap terhubung dengan wisatawan. Strategi ini merupakan bentuk agency yang dapat memperluas pemahaman tentang dinamika daya tahan komunitas dalam CBT, khususnya dalam menghadapi perubahan yang berdampak pada kegiatan ekowisata bahari mereka. Ini juga berbeda dari studi Rogerson (2021) yang lebih fokus pada dampak ekonomi lokal, dengan menekankan aspek resistensi sosial komunitas.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya desain kelembagaan dalam CBT yang lebih adaptif dan reflektif terhadap kontribusi historis komunitas. Pemerintah desa dan pengelola BUMDes harus menyusun mekanisme kolaboratif berbasis kesetaraan, bukan subordinasi, dengan mengakui hak historis dan moral komunitas sebagai penggaras. Secara konseptual, studi ini memperluas pemahaman tentang eksklusi dalam CBT dengan memadukan aspek prosedural dan simbolik sebagai dua sisi yang saling memperkuat dalam menyingkirkan aktor lokal. Oleh karena itu, model CBT yang berkelanjutan seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan konservasi lingkungan, tetapi juga pemeliharaan memori sosial dan pengakuan kontribusi sebagai fondasi penting dari tata kelola yang inklusif dan adil dalam konteks ekowisata bahari.

Bagian hasil penelitian ini akan mengungkapkan beberapa temuan kunci terkait dengan:

1. Sejarah dan Motivasi Inisiatif Lokal: Bagaimana kelompok pemuda memandang potensi hutan mangrove sebagai daya tarik wisata, proses kreatif mereka dalam

membangun lintasan pejalan kaki dari limbah kayu, dan motivasi awal mereka (misalnya, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, atau keduanya).

2. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Awal: Bagaimana masyarakat lokal (selain kelompok pemuda) merespons inisiatif awal ini, tingkat partisipasi mereka, dan manfaat yang mereka rasakan sebelum adanya intervensi pemerintah.
3. Dampak Intervensi Pemerintah Daerah: Perubahan yang terjadi setelah adanya pembangunan TPI dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk peningkatan kunjungan wisatawan, perubahan infrastruktur, dan munculnya potensi konflik pengelolaan.
4. Perspektif Kelompok Pemuda Perintis: Bagaimana kelompok pemuda perintis memandang peran mereka saat ini, kekhawatiran mereka terkait hilangnya kontrol pengelolaan, dan harapan mereka untuk keterlibatan yang berkelanjutan.
5. Perspektif Pemerintah Desa: Bagaimana pemerintah desa melihat potensi pariwisata di Banua Pangka, alasan mereka mengambil peran yang lebih aktif dalam pengelolaan, dan bagaimana mereka berencana melibatkan masyarakat (termasuk kelompok pemuda).
6. Potensi dan Tantangan Pengembangan CBT: Analisis potensi Banua Pangka sebagai destinasi CBT yang berkelanjutan, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dengan mempertimbangkan aspek ekologi mangrove, sosial budaya masyarakat, dan ekonomi lokal. Tantangan utama di sini adalah resolusi konflik pengelolaan.
7. Model Tata Kelola CBT yang Diusulkan: Berdasarkan analisis data, Anda dapat mengusulkan model tata kelola yang ideal untuk Banua Pangka dengan pendekatan CBT, yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak (kelompok pemuda, pemerintah desa, masyarakat luas, wisatawan) dan memastikan keberlanjutan ekologis.

IV. KESIMPULAN

Paket wisata ini dirancang bukan sebagai atraksi massal, tetapi sebagai tur kelompok kecil yang edukatif dan immersif. Modelnya terbagi dalam beberapa aktivitas inti. Pertama, "Guided Ethnobotanical Tour": Wisatawan diajak oleh pemandu lokal (pengelola desa adat atau tokoh masyarakat) berkeliling ke pekarangan warga untuk mengenal langsung tanaman upakara,

lengkap dengan penjelasan nama Latin, fungsi ritual, dan makna simbolisnya. Aktivitas ini langsung memanfaatkan kekuatan lingkungan dan pengetahuan tradisional. Kedua, "Hands-on Offering Workshop": Di bawah bimbingan ahli *jejaitan* (perangkai banten), wisatawan belajar merangkai *banten* sederhana (seperti ; *canang sari*) menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan dari kebun desa. Aktivitas ini memberikan pengalaman praktis dan penghasilan tambahan bagi para perangkai.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Community-Based Tourism (CBT) di Banua Pangka mengalami dinamika kelembagaan yang kompleks dan tidak selalu linear. Inisiatif awal yang lahir dari kepedulian komunitas lokal terhadap potensi lingkungan dan ekonomi berhasil membentuk fondasi awal destinasi ekowisata bahari. Namun, seiring meningkatnya perhatian dan intervensi institusi formal, terjadi pergeseran tata kelola dari model partisipatif menuju struktur administratif yang lebih hirarkis. Proses ini berdampak pada terpinggirkannya peran komunitas penggagas, menciptakan konflik peran dan ketimpangan akses terhadap manfaat pariwisata. Meskipun demikian, komunitas menunjukkan kapasitas adaptif dengan membentuk ruang usaha alternatif sebagai bentuk negosiasi dan perlawanannya terhadap eksklusi struktural. Secara teoretik, studi ini menegaskan bahwa tata kelola destinasi berbasis masyarakat bukan sekadar tentang pelibatan teknis komunitas, melainkan mencakup aspek legitimasi historis, hak moral, dan relasi kuasa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap CBT perlu didekati melalui perspektif kritis yang mempertimbangkan dinamika institusional dan politik lokal

Penelitian ini menyajikan potret mendalam tentang bagaimana transformasi tata kelola dalam Community-Based Tourism dapat menciptakan eksklusi terhadap komunitas penggagas destinasi. Melalui studi kasus Banua Pangka di Luwu Timur, ditemukan bahwa birokratisasi dan formalisasi pengelolaan yang dilakukan oleh institusi seperti pemerintah desa dan BUMDes berdampak langsung pada partisipasi dan legitimasi sosial komunitas. Eksklusi ini tidak terjadi secara frontal, melainkan melalui mekanisme simbolik dan prosedural yang secara perlahan menggeser posisi komunitas dari pusat ke pinggiran pengambilan keputusan dalam pengembangan ekowisata bahari.

Temuan ini memperkaya literatur tentang CBT dengan menambahkan perspektif resistensi adaptif yang dilakukan oleh komunitas lokal. Komunitas Banua Pangka menunjukkan bahwa keterpinggiran tidak selalu berujung pada pasivitas, melainkan bisa menjadi titik awal lahirnya strategi baru yang lebih mandiri dan kontekstual. Dengan membentuk kelompok usaha wisata alternatif dan tetap melayani wisatawan melalui pendekatan lokal, komunitas berhasil mempertahankan keberadaan dan relevansinya di tengah dominasi

kelembagaan. Kontribusi konseptual studi ini terletak pada integrasi antara teori eksklusi sosial, desain kelembagaan dalam CBT, dan strategi adaptif komunitas. Secara praktis, hasil studi ini dapat menjadi rujukan bagi perancang kebijakan lokal dan pelaku pengelola destinasi untuk merumuskan model tata kelola yang lebih kolaboratif, reflektif, dan berbasis pada pengakuan historis terhadap kontribusi komunitas.

Meskipun bersifat kontekstual, studi ini membuka ruang pembelajaran lintas destinasi. Diharapkan bahwa desain CBT ke depan tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan konservasi, tetapi juga mengafirmasi keadilan sosial dan etika pengakuan sebagai fondasi tata kelola pariwisata yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks pengembangan ekowisata bahari yang mengandalkan partisipasi aktif masyarakat.

Pemahaman Mendalam dan Filosofis tentang Marine Ecotourism dan CBT dalam Konteks Mangrove

Secara filosofis, penelitian ini menyentuh beberapa aspek penting. Keberlanjutan (Sustainability): Pemanfaatan hutan mangrove sebagai objek wisata harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi. Ini berarti tidak hanya memaksimalkan potensi ekonomi pariwisata, tetapi juga memastikan kelestarian ekosistem mangrove dan kesejahteraan masyarakat lokal dalam jangka panjang. Filosofi ini menekankan tanggung jawab kita terhadap generasi mendatang. Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pendekatan CBT menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Ini sejalan dengan filosofi keadilan sosial, di mana manfaat pariwisata harus didistribusikan secara adil dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka bukan hanya menjadi penonton atau pekerja, tetapi pemilik dan pengelola sumber daya wisata. Konservasi Berbasis Masyarakat, Mengintegrasikan konservasi dengan pariwisata melalui CBT memiliki filosofi bahwa masyarakat lokal adalah penjaga terbaik lingkungan mereka. Dengan memberikan mereka insentif ekonomi dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan, rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pelestarian mangrove akan meningkat.

Harmoni Manusia dan Alam: Hutan mangrove bukan hanya sekadar sumber daya alam, tetapi juga ekosistem yang kompleks dan penting bagi keseimbangan lingkungan. Pengembangan ekowisata harus didasarkan pada filosofi harmoni antara manusia dan alam, di mana kegiatan pariwisata dilakukan dengan menghormati dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nilai Edukasi dan Kesadaran, Ekowisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran wisatawan dan masyarakat lokal tentang pentingnya ekosistem mangrove. Filosofi di baliknya adalah bahwa pemahaman dan apresiasi terhadap alam akan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Penguatan Kelembagaan Inklusif
2. Pemerintah desa dan BUMDes perlu membangun mekanisme kolaborasi yang mengakui kontribusi komunitas lokal dalam sejarah pembangunan destinasi. Forum bersama yang bersifat deliberatif dapat dibentuk untuk menjembatani kepentingan komunitas dan institusi formal.
3. Legalitas dan Perlindungan Inisiatif Komunitas
4. Perlu adanya regulasi lokal yang melindungi hak kekayaan intelektual komunitas atas inovasi destinasi, termasuk pengakuan terhadap kontribusi non-material dalam bentuk tenaga, ide, dan jaringan sosial.
5. Peningkatan Kapasitas Komunitas secara Struktural
6. Program pelatihan dan penguatan kapasitas tidak hanya diarahkan pada aspek teknis wisata, tetapi juga pada aspek advokasi, manajemen konflik, dan literasi kelembagaan, agar komunitas mampu mempertahankan ruang partisipasi secara berkelanjutan.
7. Evaluasi Kritis Model CBT oleh Pemerintah Daerah dan Akademisi
8. Model CBT yang ada perlu dikaji ulang secara kritis agar tidak terjebak pada pendekatan **partisipasi simbolik**. Pelibatan akademisi dalam proses monitoring dan evaluasi dapat memberikan perspektif objektif terhadap efektivitas tata kelola.
9. Pendekatan Interdisipliner dan Kontekstual
10. Dalam merancang kebijakan dan intervensi pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, pendekatan interdisipliner—menggabungkan ekologi, sosiologi, ekonomi, dan studi pembangunan—perlu diterapkan agar respons terhadap perubahan sosial lebih adaptif dan kontekstual.

Dengan mempertimbangkan realitas di lapangan dan potensi komunitas, keberlanjutan CBT di Banua Pangka hanya dapat dicapai apabila terjadi pergeseran paradigma dari **kontrol kelembagaan menuju pengakuan dan redistribusi kuasa secara adil**.

Mekanisme keberlanjutan dijamin melalui sistem revenue sharing. Sebagian pendapatan dari paket wisata dialokasikan secara khusus untuk “Dana Konservasi Tanaman Upakara”. Dana ini digunakan untuk menyediakan

bibit tanaman langka secara gratis kepada warga yang bersedia menanam dan merawatnya di pekarangan, serta untuk perawatan koleksi tanaman di *lingkungan sekitar pura*. Dengan demikian, aktivitas wisata tidak hanya mengambil, tetapi secara langsung berkontribusi pada pengayaan dan pelestarian sumber daya botanis desa. Keterlibatan *banjar* memastikan model berjalan tertib, sementara skala kelompok kecil menjaga keberlanjutan ekologis dan tidak mengganggu kekhidmatan upacara. Model ini secara realistik memanfaatkan semua kekuatan yang dimiliki Jelekungkang untuk menciptakan produk wisata unik yang membedakannya dari destinasi lain, sekaligus menjawab ancaman kelangkaan tanaman dan erosi pengetahuan dengan aksi konservasi yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI

- Agrawal, A. (2001). Common property institutions and sustainable governance of resources. *World Development*, 29(10), 1649–1672. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00063-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00063-8)
- Arsyad, A., Rahman, M., & Hasyim, M. (2023). Dynamics of institutional transition in marine ecotourism governance: The case of Banua Pangka. *Jurnal Pariwisata Bahari*.
- Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N., & Paddon, M. (2010). Effective community based tourism: A best practice manual. Sustainable Tourism Cooperative Research Centre.
- Beeton, S. (2006). Community development through tourism. Landlinks Press.
- Bianchi, R. V. (2009). Tourism, resistance and identity: A critical ethnography of British backpackers in Thailand. Channel View Publications.
- Blackstock, K. (2005). A critical look at community based tourism. *Community Development Journal*, 40(1), 39–49. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsi005>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

- Butcher, J. (2007). Ecotourism, NGOs and development: A critical analysis. Routledge.
- Cole, S. (2006). Information and empowerment: The keys to achieving sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 14(6), 629-644. <https://doi.org/10.2167/jost607.0>
- Coria, J., & Calfucura, E. (2012). Ecotourism and the development of indigenous communities: The good, the bad and the ugly. *Ecological Economics*, 73, 47-55.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Dredge, D., & Jenkins, J. (2007). Tourism planning and policy. Wiley.
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2014). From community-based tourism to sustainable strategies: Paths taken by SMMEs. *Journal of Human Ecology*, 46(1), 21-26.
- Goodwin, H. (2009). Values, sustainability, and tourism. Cornell University Press.
- Hall, C. M. (2011). Tourism and inequality: Problems and prospects. CABI.
- Hall, C. M. (2011). A typology of governance and its implications for tourism policy analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 437-457. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.570346>
- Hall, C. M., & Jenkins, J. (1995). Tourist destination development: Policies, planning and the development process (2nd ed.). Routledge.
- Hampton, M. P. (2005). Heritage, local communities and economic development. *Annals of Tourism Research*, 32(3), 735-759. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.10.010>
- Isaacs, M. (2000). The political economy of community-based tourism development. *Journal of Sustainable Tourism*, 8(3), 289-306.
- Jamal, T., & Camargo, B. A. (2014). Sustainable tourism, justice and an ethic of care: Toward the Just Destination. *Journal of Sustainable Tourism*, 22(1), 11-30. <https://doi.org/10.1080/09669582.2013.786084>
- Jamal, T., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. *Annals of Tourism Research*, 22(1), 186-204.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.
- Mair, H., & Reid, D. G. (2007). Tourism and community development: Reframing the relationship. *Community Development Journal*, 42(4), 504-519. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsl007>
- Manyara, G., & Jones, E. (2007). Community-based tourism enterprise development in Kenya: An exploration of their potential as avenues of poverty reduction. *Journal of Sustainable Tourism*, 15(6), 628-644.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). Designing qualitative research (6th ed.). SAGE Publications.
- Mitchell, J., & Ashley, C. (2010). Tourism and poverty reduction: Pathways to prosperity. Earthscan.
- Mitchell, J., & Muckosy, P. (2008). Community tourism planning in developing countries: A critical review and annotated bibliography. *Journal of Tourism Studies*, 19(2), 27-35.
- Novelli, M., & Gebhardt, A. (2007). Innovation systems and network governance in tourism: The Indonesian case. *International Journal of Innovation Management*, 11(4), 605-633.
- Orams, M. B. (1995). Toward responsible wildlife tourism. *Tourism Management*, 16(1), 3-11.
- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 011 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Kabupaten Luwu Timur.
- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (2022). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2022-2037. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.
- Perdana, I., & Hasan, R. (2023). Formalisasi pengelolaan ekowisata mangrove: Studi kasus Banua Pangka. *Jurnal Ekowisata Indonesia*.
- Rahman, M., Darwis, A., & Arsyad, A. (2022). Pemanfaatan limbah kayu dalam pengembangan ekowisata mangrove Banua Pangka. Prosiding Seminar Ekowisata.
- Reed, M. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature review. *Biological Conservation*, 141(10), 2417-2431.
- Scheyvens, R. (2002). Tourism for development: Empowering communities. Pearson Education.

Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. Routledge.

Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589–609.
<https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1381985>

Simpson, M. C. (2008). Community benefit tourism initiatives—A conceptual oxymoron? *Tourism Management*, 29(1), 1–18.

Stone, M. T., & Nyaupane, G. P. (2018). Protected areas, wildlife-based community tourism and community livelihoods dynamics: Spiraling up and down of community capitals. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(2), 307–324.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1349774>

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.